



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 75 TAHUN 2015

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, diperlukan Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

Handwritten signature

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

Handwritten signature

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Handwritten signature/initials

20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2006 Nomor 10);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 Nomor 11);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 18);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 08 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 08);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 4);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2014.

B. H. A. f

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2014 terdiri dari:

a. Pendapatan

| | | | |
|---|----|----------------------|------------------------|
| 1. Pendapatan Asli Daerah | Rp | 202.593.689.614,00 | |
| 2. Dana Perimbangan | Rp | 1.136.928.031.787,00 | |
| 3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah | Rp | 6.100.074.277,00 | |
| Jumlah Pendapatan | | | Rp1.345.621.795.678,00 |

b. Belanja

1. Belanja Tidak Langsung

| | | | |
|---|-----|--------------------|-----------------------|
| a. Belanja Pegawai | Rp | 722.485.060.979,00 | |
| b. Belanja Bunga | Rp | 17.095.745,00 | |
| c. Belanja Subsidi | Rp | 400.000.000,00 | |
| d. Belanja Hibah | Rp | 44.328.185.710,00 | |
| e. Belanja Bantuan Sosial | Rp | 8.132.728.900,00 | |
| f. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa | Rp. | 3.821.310,00 | |
| g. Belanja Bantuan Keuangan | Rp. | 51.816.649.200,00 | |
| h. Belanja Tidak Terduga | | | Rp 827.193.541.844,00 |

2. Belanja Langsung

| | | | |
|----------------------------|----|---------------------------|------------------------|
| a. Belanja Pegawai | Rp | 37.523.660.906,00 | |
| b. Belanja Barang dan Jasa | Rp | 294.872.761.866,00 | |
| c. Belanja Modal | Rp | <u>112.249.667.286,00</u> | |
| | | | Rp 444.646.090.058,00 |
| Jumlah Belanja | | | Rp1.271.839.631.902,00 |
| (Surplus/Difisit) | | | Rp 73.782.163.776,00 |

c. Pembiayaan

| | | | |
|---|----|--------------------|-------------------|
| 1. Penerimaan | Rp | 133.173.166.611,00 | |
| 2. Pengeluaran | Rp | 37.671.720.746,00 | |
| Pembiayaan Netto | Rp | | 95.501.445.865,00 |
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan | Rp | | 69.283.609.641,00 |

Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 4

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 27 Juli 2015


BUPATI PURBALINGGA,

 SUKENTO RIDO MARHAENDRIANTO 

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 29 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH,


IMAM SUBIJAKTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2015 NOMOR 75

KABUPATEN PURBALINGGA
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014

| Kode Rekening | Uraian | Anggaran | Realisasi | Berlebih/ (Berkurang) | Persen |
|---------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| 1 | PENDAPATAN | | | | |
| 1.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 169.855.790.000 | 202.593.689.614 | 32.737.899.614 | 119,27 |
| 1.1.1 | Pendapatan Pajak Daerah | 32.395.194.000 | 37.837.517.809 | 5.442.323.809 | 116,80 |
| 1.1.2 | Pendapatan Retribusi Daerah | 34.622.479.000 | 33.296.583.424 | (1.325.895.576) | 96,17 |
| 1.1.3 | Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 12.008.086.000 | 12.016.649.479 | 8.563.479 | 100,07 |
| 1.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah | 90.830.031.000 | 119.442.938.902 | 28.612.907.902 | 131,50 |
| 1.2 | PENDAPATAN TRANSFER | 1.142.601.389.000 | 1.136.928.031.787 | (5.673.357.213) | 99,50 |
| 1.2.1 | Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan | 864.906.131.000 | 868.377.042.877 | 3.470.911.877 | 100,40 |
| 1.2.2 | Transfer Dana Pemerintah Pusat - Lainnya | 180.786.607.000 | 173.720.857.000 | (7.065.750.000) | 96,09 |
| 1.2.3 | Transfer Pemerintah Provinsi | 96.908.651.000 | 94.830.131.910 | (2.078.519.090) | 97,86 |
| 1.3 | Lain-lain Pendapatan daerah yang Sah | 5.370.060.000 | 6.100.074.277 | 730.014.277 | 113,59 |
| 1.3.1 | Pendapatan Hibah | 5.370.060.000 | 6.100.074.277 | 730.014.277 | 113,59 |
| 1.3.3 | Pendapatan Lainnya | - | - | - | - |
| | Jumlah Pendapatan | 1.317.827.239.000 | 1.345.621.795.678 | 27.794.556.678 | 102,11 |
| 2 | BELANJA | | | | |
| 2.1 | BELANJA OPERASI | 1.196.244.916.000 | 1.108.659.494.106 | (87.585.421.894) | 92,68 |
| 2.1.1 | Belanja Pegawai | 807.024.921.000 | 760.008.721.885 | (47.016.199.115) | 94,17 |
| 2.1.2 | Belanja Barang/Jasa | 326.100.799.000 | 294.872.761.866 | (31.228.037.134) | 90,42 |
| 2.1.3 | Belanja Bunga | 24.688.000 | 17.095.745 | (7.592.255) | 69,25 |
| 2.1.4 | Belanja Subsidi | 400.000.000 | 400.000.000 | - | 100,00 |
| 2.1.5 | Belanja Hibah | 51.674.758.000 | 44.328.185.710 | (7.346.572.290) | 85,78 |
| 2.1.6 | Belanja Bantuan Sosial | 10.119.750.000 | 8.132.728.900 | (1.987.021.100) | 80,36 |
| 2.1.7 | Belanja Bantuan Keuangan | 900.000.000 | 900.000.000 | - | 100,00 |
| 2.2 | BELANJA MODAL | 160.643.990.000 | 112.249.667.286 | (48.394.322.714) | 69,87 |
| 2.2.1 | Belanja Tanah | 11.764.458.000 | 7.152.074.703 | (4.612.383.297) | 60,79 |
| 2.2.2 | Belanja Peralatan dan Mesin | 45.085.798.000 | 32.536.700.768 | (12.549.097.232) | 72,17 |
| 2.2.3 | Belanja Gedung dan Bangunan | 41.336.266.000 | 31.292.893.150 | (10.043.372.850) | 75,70 |
| 2.2.4 | Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan | 54.881.639.000 | 39.009.750.850 | (15.871.888.150) | 71,08 |
| 2.2.5 | Belanja Aset Tetap Lainnya | 7.575.829.000 | 2.258.247.815 | (5.317.581.185) | 29,81 |
| 2.3 | BELANJA TIDAK TERDUGA | 1.902.203.000 | - | (1.902.203.000) | - |
| 2.3.1 | Belanja Tidak Terduga | 1.902.203.000 | - | (1.902.203.000) | - |
| 2.4 | TRANSFER | 54.081.299.000 | 50.930.470.510 | (3.150.828.490) | 94,17 |
| 2.4.1 | TRANSFER BAGI HASIL DESA | 54.081.299.000 | 50.930.470.510 | (3.150.828.490) | 94,17 |
| | Jumlah Belanja | 1.412.872.408.000 | 1.271.839.631.902 | (141.032.776.098) | 90,02 |
| | Surplus/Defisit | (95.045.169.000) | 73.782.163.776 | 168.827.332.776 | 177,63 |
| 3 | PEMBIAYAAN | | | | |
| 3.1 | PENERIMAAN DAERAH | 132.878.401.000 | 133.173.166.611 | 294.765.611 | 100,22 |
| 3.1.1 | Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) | 132.878.401.000 | 132.878.401.876 | 876 | 100,00 |
| 3.1.5 | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman | - | 294.764.735 | 294.764.735 | - |
| 3.2 | PENGELUARAN DAERAH | 37.833.232.000 | 37.671.720.746 | (161.511.254) | 99,57 |
| 3.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 27.508.000.000 | 27.508.000.000 | - | 100,00 |
| 3.2.2 | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah | 10.261.510.000 | 10.100.000.000 | (161.510.000) | 98,43 |
| 3.2.3 | Pembayaran Pokok Utang | 63.722.000 | 63.720.746 | (1.254) | 100,00 |
| | Selisih netto/Bruto | 95.045.169.000 | 95.501.445.865 | 133.254.357 | 100,48 |
| | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran | - | 169.283.609.641 | 169.283.609.641 | - |

Diundangkan di Purbalingga
 pada tanggal 29 Juli 2015
 SEKRETARIS DAERAH,

IMAM SUBIJAKTO
 BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2015 NOMOR 75

BUPATI PURBALINGGA,

SUKENTO RIDO MARHAENDRIANTO

KABUPATEN PURBALINGGA
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2014

| Kode Rekening | Uraian | Anggaran | Realisasi | Berlebih/ (Berkurang) | Persen |
|---------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| 4 | PENDAPATAN DAERAH | | | | |
| 4.1 | Pendapatan Asli Daerah | 169.855.790.000 | 202.593.689.614 | 32.737.899.614 | 119,27 |
| 4.1.1 | Hasil Pajak Daerah 1) | 32.395.194.000 | 37.837.517.809 | 5.442.323.809 | 116,80 |
| 4.1.2 | Hasil Retribusi Daerah 1) | 34.622.479.000 | 33.296.583.424 | (1.325.895.576) | 96,17 |
| 4.1.3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 12.008.086.000 | 12.016.649.479 | 8.563.479 | 100,07 |
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah | 90.830.031.000 | 119.442.938.902 | 28.612.907.902 | 131,50 |
| 4.2 | Dana perimbangan | 864.906.131.000 | 868.377.042.877 | 3.470.911.877 | 100,40 |
| 4.2.1 | Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak | 29.649.302.000 | 33.120.213.877 | 3.470.911.877 | 111,71 |
| 4.2.2 | Dana Alokasi Umum | 777.989.499.000 | 777.989.499.000 | - | 100,00 |
| 4.2.3 | Dana Alokasi Khusus | 57.267.330.000 | 57.267.330.000 | - | 100,00 |
| 4.3 | Lain-lain Pendapatan daerah yang Sah | 283.065.318.000 | 274.651.063.187 | (8.414.254.813) | 97,03 |
| 4.3.1 | Pendapatan Hibah | 5.370.060.000 | 6.100.074.277 | 730.014.277 | 113,59 |
| 4.3.3 | Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya | 53.253.927.000 | 64.269.725.000 | 11.015.798.000 | 120,69 |
| 4.3.4 | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | 180.786.607.000 | 173.720.857.000 | (7.065.750.000) | 96,09 |
| 4.3.5 | Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintahan Daerah Lainnya | 43.654.724.000 | 30.560.406.910 | (13.094.317.090) | 70,00 |
| 4.3.6 | Dana Penyesuaian Tunjangan Pendidikan | - | - | - | - |
| | Jumlah Pendapatan | 1.317.827.239.000 | 1.345.621.795.678 | 27.794.556.678 | 102,11 |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | | |
| 5.1 | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 853.381.431.000 | 797.400.582.884 | (55.980.848.116) | 93,44 |
| 5.1.1 | BELANJA PEGAWAI | 767.190.798.000 | 722.485.060.979 | (44.705.737.021) | 94,17 |
| 5.1.2 | BELANJA BUNGA | 24.688.000 | 17.095.745 | (7.592.255) | 69,25 |
| 5.1.3 | BELANJA SUBSIDI | 400.000.000 | 400.000.000 | - | 100,00 |
| 5.1.4 | BELANJA HIBAH | 18.762.693.000 | 14.535.226.750 | (4.227.466.250) | 77,47 |
| 5.1.5 | BELANJA BANTUAN SOSIAL | 10.119.750.000 | 8.132.728.900 | (1.987.021.100) | 80,36 |
| 5.1.6 | BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA | 17.500.000 | 13.821.310 | (3.678.690) | 78,98 |
| 5.1.7 | BELANJA BANTUAN KEUANGAN | 54.963.799.000 | 51.816.649.200 | (3.147.149.800) | 94,27 |
| 5.1.8 | BELANJA TIDAK TERDUGA | 1.902.203.000 | - | (1.902.203.000) | - |
| 5.2 | BELANJA LANGSUNG | 559.490.977.000 | 474.439.049.018 | (85.051.927.982) | 84,80 |
| 5.2.1 | BELANJA PEGAWAI | 39.834.123.000 | 37.523.660.906 | (2.310.462.094) | 94,20 |
| 5.2.2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 359.012.864.000 | 324.665.720.826 | (34.347.143.174) | 90,43 |
| 5.2.3 | BELANJA MODAL | 160.643.990.000 | 112.249.667.286 | (48.394.322.714) | 69,87 |
| | Jumlah Belanja | 1.412.872.408.000 | 1.271.839.631.902 | (141.032.776.098) | |
| | Surplus/Defisit | (95.045.169.000) | 73.782.163.776 | 168.827.332.776 | 177,63 |
| 6 | PEMBIAYAAN DAERAH | | | | |
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Daerah | 132.878.401.000 | 133.173.166.611 | 294.765.611 | 100,22 |
| 6.1.1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya | 132.878.401.000 | 132.878.401.876 | 876 | 100,00 |
| 6.1.5 | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman | - | 294.764.735 | 294.764.735 | - |
| | Jumlah Penerimaan Pembiayaan | 132.878.401.000 | 133.173.166.611 | 294.765.611 | 100,22 |
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 37.833.232.000 | 37.671.720.746 | (161.511.254) | 99,57 |
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 27.508.000.000 | 27.508.000.000 | - | 100,00 |
| 6.2.2 | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah | 10.261.510.000 | 10.100.000.000 | (161.510.000) | 98,43 |
| 6.2.3 | Pembayaran Pokok Utang | 63.722.000 | 63.720.746 | (1.254) | 100,00 |
| | Jumlah Pengeluaran Pembiayaan | 37.833.232.000 | 37.671.720.746 | (161.511.254) | 99,57 |
| | Selisih netto/Bruto | 95.045.169.000 | 95.501.445.865 | 456.276.865 | 100,48 |
| | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran | 0 | 169.283.609.641 | 169.283.609.641 | - |

Diundangkan di Purbalingga
 pada tanggal 29 Juli 2015
 SEKRETARIS DAERAH,

IMAM SUBIAKTO
 BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2015 NOMOR 75

BUPATI PURBALINGGA,

SUKENTO RIDO MARHAENDRIANTO

KABUPATEN PURBALINGGA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 Pendidikan
 ORGANISASI : 1.01.01 Dinas Pendidikan

| Kode Rekening | | | | Uraian | Anggaran | Realisasi | Berlebih/ (Berkurang) | Persen | Penjelasan |
|---------------|---------|----|-----|-------------|---|-----------------|--------------------------|------------------|------------|
| 1.01 | 1.01.01 | 00 | 00 | 5 | BELANJA TIDAK LANGSUNG | | | | |
| 1.01 | 1.01.01 | 00 | 00 | 5.1 | BELANJA DAERAH | 215.229.146.000 | 199.335.526.605 | (15.893.619.395) | 92,62 |
| 1.01 | 1.01.01 | 00 | 00 | 5.1 | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 215.229.146.000 | 199.335.526.605 | (15.893.619.395) | 92,62 |
| 1.01 | 1.01.01 | 00 | 00 | 5.1.1 | BELANJA PEGAWAI | 215.229.146.000 | 199.335.526.605 | (15.893.619.395) | 92,62 |
| 1.01 | 1.01.01 | 00 | 00 | 5.1.1.01 | Gaji dan Tunjangan | 6.872.422.000 | 6.788.190.305 | (84.231.695) | 92,62 |
| 1.01 | 1.01.01 | 00 | 00 | 5.1.1.01.01 | Gaji Pokok PNS / Uang Presentasi 1) | 5.257.779.000 | 5.191.734.040 | (66.044.960) | 98,74 |
| 1.01 | 1.01.01 | 00 | 00 | 5.1.1.01.02 | Tunjangan Keluarga | 491.583.000 | 484.661.428 | (6.921.572) | 98,59 |
| 1.01 | 1.01.01 | 00 | 00 | 5.1.1.01.03 | Tunjangan Jabatan 1) | 187.183.000 | 181.210.000 | (5.973.000) | 96,81 |
| 1.01 | 1.01.01 | 00 | 00 | 5.1.1.01.04 | Tunjangan Fungsional | 252.018.000 | 247.189.000 | (4.829.000) | 98,08 |
| 1.01 | 1.01.01 | 00 | 00 | 5.1.1.01.05 | Tunjangan Umum | 140.016.000 | 139.705.000 | (311.000) | 99,78 |
| 1.01 | 1.01.01 | 00 | 00 | 5.1.1.01.06 | Tunjangan Beras 1) | 276.476.000 | 272.064.000 | (4.412.000) | 98,40 |
| 1.01 | 1.01.01 | 00 | 00 | 5.1.1.01.07 | Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus | 108.216.000 | 114.348.454 | 6.132.454 | 105,67 |
| 1.01 | 1.01.01 | 00 | 00 | 5.1.1.01.08 | Pembulatan Gaji | 79.000 | 90.309 | 11.309 | 114,32 |
| 1.01 | 1.01.01 | 00 | 00 | 5.1.1.01.09 | Iuran Asuransi Kesehatan | 159.072.000 | 157.188.074 | (1.883.926) | 98,82 |
| 1.01 | 1.01.01 | 00 | 00 | 5.1.1.02 | Tambahan Penghasilan PNS | 469.200.000 | 404.550.000 | (64.650.000) | 92,62 |
| 1.01 | 1.01.01 | 00 | 00 | 5.1.1.02.01 | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja | 469.200.000 | 404.550.000 | (64.650.000) | 86,22 |
| 1.01 | 1.01.01 | 00 | 00 | 5.1.1.05 | Penghasilan Lainnya | 207.887.524.000 | 192.142.786.300 | (15.744.737.700) | 92,62 |
| 1.01 | 1.01.01 | 00 | 00 | 5.1.1.05.02 | Tambahan Penghasilan Guru PNS Non Sertifikasi | 10.370.575.000 | 2.345.437.500 | (8.025.137.500) | 22,62 |
| 1.01 | 1.01.01 | 00 | 00 | 5.1.1.05.03 | Tunjangan Profesi Guru Sertifikasi | 197.516.949.000 | 189.797.348.800 | (7.719.600.200) | 96,09 |
| 1.01 | 1.01.01 | 01 | | | BELANJA LANGSUNG | | | | |
| 1.01 | 1.01.01 | 01 | | | Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah | 1.608.682.000 | 1.499.695.054 | (108.986.946) | 93,23 |
| 1.01 | 1.01.01 | 01 | 001 | | Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran | 407.427.000 | 340.802.162 | (66.624.838) | 83,65 |
| 1.01 | 1.01.01 | 01 | 001 | 5 | BELANJA DAERAH | 407.427.000 | 340.802.162 | (66.624.838) | 83,65 |
| 1.01 | 1.01.01 | 01 | 001 | 5.2 | BELANJA LANGSUNG | 407.427.000 | 340.802.162 | (66.624.838) | 83,65 |
| 1.01 | 1.01.01 | 01 | 001 | 5.2.1 | BELANJA PEGAWAI | 111.260.000 | 102.172.000 | (9.088.000) | 91,83 |
| 1.01 | 1.01.01 | 01 | 001 | 5.2.1.01 | Honorarium PNS | 65.460.000 | 58.180.000 | (7.280.000) | 91,83 |
| 1.01 | 1.01.01 | 01 | 001 | 5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 3.960.000 | 3.960.000 | - | 100,00 |

1

| Kode Rekening | | | | Uraian | Anggaran | Realisasi | Berlebih/ (Berkurang) | Persen | Penjelasan |
|---------------|---------|--------|-------------|---|------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------|------------|
| 2.04 | 2.04.01 | 15 014 | 5.2 | BELANJA LANGSUNG | 50.000.000 | 48.918.500 | (1.081.500) | 97,84 | |
| 2.04 | 2.04.01 | 15 014 | 5.2.1 | BELANJA PEGAWAI | 504.000 | - | (504.000) | - | |
| 2.04 | 2.04.01 | 15 014 | 5.2.1.03 | Uang Lembur | 504.000 | - | (504.000) | - | |
| 2.04 | 2.04.01 | 15 014 | 5.2.1.03.01 | Uang Lembur PNS | 387.000 | - | (387.000) | - | |
| 2.04 | 2.04.01 | 15 014 | 5.2.1.03.02 | Uang Lembur Non PNS | 117.000 | - | (117.000) | - | |
| 2.04 | 2.04.01 | 15 014 | 5.2.2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 49.496.000 | 48.918.500 | (577.500) | 98,83 | |
| 2.04 | 2.04.01 | 15 014 | 5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 401.000 | 401.000 | - | 98,83 | |
| 2.04 | 2.04.01 | 15 014 | 5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 401.000 | 401.000 | - | 100,00 | |
| 2.04 | 2.04.01 | 15 014 | 5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 47.800.000 | 47.700.000 | (100.000) | 98,83 | |
| 2.04 | 2.04.01 | 15 014 | 5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Pihak Ketiga | 47.800.000 | 47.700.000 | (100.000) | 99,79 | |
| 2.04 | 2.04.01 | 15 014 | 5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 165.000 | - | (165.000) | 98,83 | |
| 2.04 | 2.04.01 | 15 014 | 5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 75.000 | - | (75.000) | - | |
| 2.04 | 2.04.01 | 15 014 | 5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 90.000 | - | (90.000) | - | |
| 2.04 | 2.04.01 | 15 014 | 5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 630.000 | 337.500 | (292.500) | 98,83 | |
| 2.04 | 2.04.01 | 15 014 | 5.2.2.11.02 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 630.000 | 337.500 | (292.500) | 53,57 | |
| 2.04 | 2.04.01 | 15 014 | 5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 500.000 | 480.000 | (20.000) | 98,83 | |
| 2.04 | 2.04.01 | 15 014 | 5.2.2.15.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 500.000 | 480.000 | (20.000) | 96,00 | |
| | | | | Jumlah Belanja | 6.920.901.000 | 6.514.428.970 | (406.472.030) | 94,13 | |
| | | | | Surplus/Defisit | (6.255.401.000) | (5.819.904.570) | 435.496.430 | (115,24) | |
| | | | | Sisa Lebih (Kurang) Perhitungan Anggaran | (6.255.401.000) | (5.819.904.570) | 435.496.430 | 95,02 | |

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 29 Juli 2015
SEKRETARIS DAERAH,

IMAM SUBIJAKTO
BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2015 NOMOR 75

BUPATI PURBALINGGA,,

SUKENTO RIDO MARHAENDRIANTO